



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN IZIN
PINJAM PAKAI HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN
PERTAMBANGAN**

(Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT))

TESIS

HENDRY HESTAMMA PRASETYA

1120922027

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2015**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN IZIN
PINJAM PAKAI HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN
PERTAMBANGAN**

(Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT))

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum**

HENDRY HESTAMMA PRASETYA

1120922027

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

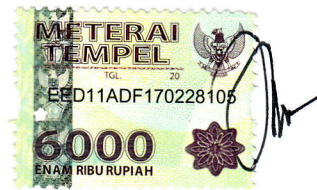
Nama : Hendry Hestamma Prasetya.SH.

NRP : 120922027

Tanggal : 18 Desember 2014

Jakarta, 18 Desember 2014

Yang Menyatakan,



(Hendry Hestamma Prasetya.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Hestamma Prasetya.SH.
NRP : 120922027
Program : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

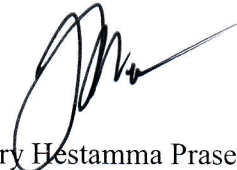
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**INJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN IZIN PINJAMPAKAI
HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
(Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2014

Yang menyatakan



Hendry Hestamma Prasetya.

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Hendry Hestamma Prasetya
NPM : 122.0922.027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Izin Pinjam Pakai Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NTT))

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH, APU
Penguji Ahli

Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK, MBA
Penguji 1/Pembimbing

Dr. Mo. Hatta, SH, M.Kn
Penguji 2/Pembimbing

Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM
Direktur

Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ka.Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 Januari 2015

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN IZIN PINJAM PAKAI
HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
(Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT))**

HENDRY HESTAMMA PRASETYA

ABSTRAK

Dilihat dari aspek sosial, pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktek-praktek pendudukan hutan yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai, menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari pemanfaatan hutan yang tidak sesuai. Selain bencana alam, pendudukan hutan ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka. Dari latar belakang di atas, maka pembahasan difokuskan pada masalah bagaimana aturan-aturan tentang perijinan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan?; bagaimana terjadinya keputusan ijin pinjam pakai hutan lindung untuk kegiatan pertambangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mencoba menggali/ mengeksplorasi hal ihwal keputusan ijin pinjam pakai hutan untuk kegiatan pertambangan. Berdasarkan pada uraian masalah, maka di akhir penulisan dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan adanya Undang-undang kehutanan maka dilarang untuk melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung dengan menetapkan Undang-undang oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara otomatis perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin kontrak karya tidak dapat melakukan eksplorasi dan eksplotasi pada kawasan hutan lindung sebab di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan sebuah larangan dalam kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Sebagai hal yang membawa kerugian, maka kegiatan pertambangan perlu dihindari dampak negatif dengan cara menyetop semua bentuk perizinan baru, mengevaluasi semua perizinan yang telah diberikan, tinggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk merangsang investor pertambangan ke Indonesia, mengupayakan pelebagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak, kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral.

Di akhir penulisan, penulis memberikan saran agar penyalahgunaan wewenang perijinan dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dapat diantisipasi maka masyarakat perlu diberikan sosialisasi mengenai arti dan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan sehingga penyalahgunaan fungsi hutan dapat dihindarkan. Perlu ditingkatkan undang-undang dan peraturan-peraturan pertambangan baik dari segi materiil maupun sanksi hukum yang diberikan, dan perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat dalam pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh ijin harus melalui prosedur yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Perijinan Pemakaian, Hutan Lindung, Hutan Lindung Kegiatan Pertambangan

**JUDICIAL REVIEW DECISION AGAINST FORES PRESERVE
USAGE LICENSE TO MINING ACTIVITES (CASE STUDY
PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT.NNT)**

HENDRY HESTAMMA PRASETYA

ABSTRACT

Judging from the social aspect, the utilization of forest areas that do not fit cause various conflicts such as forest rights conflicts, conflicts of authority to manage forests between Central and Local Government serta indigenous population. Cultural aspects such as people's dependence on forests, respect for the forest is still considered to have value magik also affected by the occupation of forest practices that will ultimately change the perspective and behavior of the local indigenous communities to forest. The impact of ecological damage (environment) due to the utilization of forest areas that do not fit, according to various studies conducted by experts environmentalists and forestry that various natural disasters, allegedly as a result of deforestation as a result of improper use of forests. In addition to natural disasters, the occupation of these forests also cause damage to the flora and fauna and the extinction of endangered species. From the above background, the discussion focused on the problem of how the rules on licensing of protected forests for mining activities ?; how the permit decision lease protected forests for mining activities ?. The method used is a normative legal research, descriptive. This study tries to dig / explore matters of decision forest lease permits for mining activities.

Based on the description of the problem, then at the end of the writing can be concluded that in accordance with its function as life support and the presence of the forestry law prohibited to conduct mining in protected forest areas by setting the Act by the government. Act No. 41 of 1999 on Forestry, automatically mining company that has obtained a license contract work can not carry out exploration and exploitation in protected forest areas for in Article 38 paragraph (4) of Law No. 41 of 1999 set a ban on protected forest areas with a pattern of open-pit mining. As bringing a loss, then the mining activities to avoid negative impacts in a way to stop all forms of new licenses, evaluate all of the permissions that have been granted, elevate the quality standards of environmental management to stimulate mining inverter to Indonesia, seeking the institutionalization of conflict in order to achieve a satisfactory solution of various party, a policy strategy for the utilization of mineral resources.

At the end of the writing, the authors suggest that the abuse of authority permitting and use of protected forest areas for mining activities can be anticipated that the public should be given the socialization of the meaning and function of forest areas as life support so that misuse of forest functions can be avoided. Needs to be improved laws and regulations both in terms of material mining and given legal sanction, and strict supervision needs to be improved in granting lease of protected forest areas for mining activities so that every person or legal entity who wish to obtain permission to go through the procedure which have been specified

Keywords: *Permitting Use, Protected Forest, Protected Forest, Mining Activities...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Ijin Pinjam Pakai Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT)).

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE, MM selaku Direktur PPs UPN "Veteran" Jakarta
2. Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH, APU selaku Pembimbing I, Dr. Moh. Hatta, SH, M.Kn selaku Pembimbing II dan Dr. Erni Agustina, SH, SPN selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat selesai.
3. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut, yang terutama penulis ucapkan terimakasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 2014
Hendry Hestamma Prasetya.SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
I.4. Kerangka Teoretis	7
I.5. Definisi Konsep	12
I.6. Metode Penelitian	18
I.7. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
II.1. Tinjauan Kasus.....	22
II.2. Analisis	23
II.3. Pembahasan.....	32
II.4. Landasan Yuridis Program Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang.....	44
II.5. Penggolongan Program Pengembangan Masyarakat.....	48

BAB III	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	51
III.1.	Pengertian Hukum Kehutanan	51
III.2.	Asas, Tujuan, dan Sifat Hukum Kehutanan.....	56
III.3.	Hubungan Antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Kehutanan	70
III.4.	Kedudukan Hukum Kehutanan dan Hukum Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia	74
BAB IV	KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA IJIN PINJAM PAKAI KEGIATAN PERTAMBANGAN.....	79
IV.1.	Mekanisme Pemberian Ijin Pinjam Pakai Hutan Lindung Untuk Pertambangan.....	79
IV.2.	Gugatan Perwakilan (<i>Class Action</i>).....	90
IV.3.	Penyelidikan dan Penyidikan.....	94
IV.4.	Ganti Rugi dan Sanksi Administratif.....	102
BAB V	PENUTUP	103
V.1.	Kesimpulan	103
V.2.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....		107